

# IMTGT : THE TROUBLE TRIANGLE

## (Indonesia's Experience)

by : Usman Pelly  
Medan State University

*“We can no longer take the view that trade is trade and foreign policy is foreign policy. Economic is politics, trade is security.”* (Datok Abu Hassan Omar, Minister for Foreign Affairs, Malaysia, July 1988)

### **Pendahuluan**

Berbagai pengamat ekonomi, sependapat bahwa permulaan tahun 1990, merupakan puncak dari masa kejayaan Orde Baru dibidang ekonomi. Beberapa indikator ekonomi memberikan gambaran yang cukup menggembirakan. Menurut Kosim Gandataruma (1994), sejak tahun 1991 kontribusi sektor industri manufaktur terhadap *gross domestic product* (GDP) telah berkembang pesat melampaui sektor pertanian. Dalam perdagangan internasional umpamanya, total nilai ekspor dan import terhadap GDP telah berkembang melebihi 50%. Selanjutnya sektor non-migas telah melampaui dan memimpin sektor lainnya dalam keseluruhan produksi nasional. Hal ini tampak jelas dalam ekspor dan pendapatan domestik dalam perimbangan budget nasional.

Menurut Gandataruma (1994), indikator-indikator di atas menunjukkan betapa ekonomi Indonesia pada awal tahun 1990 itu telah mencapai kemajuan yang cukup menggembirakan. Bahkan para ahli ekonomi meramalkan, apabila dalam jangka lima tahun kedepan, terjadi peningkatan ekonomi yang konstan dan berlanjut, Indonesia akan dapat mengikuti sukses “macan asia” seperti Korea Selatan, Hongkong dan Singapura.



Akan tetapi kemajuan ekonomi yang luar biasa dalam indikator makro tersebut tidak dapat menepis kekhawatiran para pakar lainnya terutama di bidang sosial budaya. Mereka mempertanyakan ketimpangan pendapatan perkapita yang makin menganga, antara penduduk dikota dan diluar kota antara penduduk di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Dalam perhitungan kasar pada awal tahun 1990 itu hampir 70% dari perputaran uang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Ketimpangan ini dapat dipastikan akan mengundang masalah-masalah sosial yang sangat serius yang dapat mengancam kesetabilan politik dan integrasi nasional.

Kenyataan di atas menunjukkan betapa kebijakan politik ekonomi Orde Baru sampai dengan tahun 1991 masih sangat sentralistis. Kecenderungan penguasa Orde Baru (rezim Suharto) ini memiliki akar budaya yang sangat penting untuk diungkapkan. Seperti dinyatakan oleh Clifford Geertz (1988) hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah ini berakar pada pandangan "*indic cosmology*," sebuah "*world view*," bahwa keraton sebagai pusat kekuasaan (sentra) adalah segalanya, dia tidak hanya merupakan pusat kekuasaan, tetapi juga pusat ekonomi, teknologi dan kebudayaan.

Secara implikatif, maka dari sudut pandang dunia ini, semua orang yang berada di luar pusat kekuasaan (keraton) adalah orang yang bekerja untuk pusat kekuasaan, seperti hubungan kota dan desa, orang desa adalah pekerja untuk memenuhi kebutuhan orang kota. Orang diluar Jakarta (sebagai pusat kekuasaan), harus tunduk dan patuh kepada Jakarta. Oleh karena itu juga, dalam konsep "*indic cosmology*" ini, sebagai pemegang kekuasaan mutlak, Jakarta (sebagai pusat kekuasaan) tidak boleh ditandingi oleh pusat-pusat kekuasaan lainnya. Ini juga berarti bahwa tidak dibenarkan membangun pusat (sentra) lain terutama di pinggiran (peripheral area kerajaan), karena dikhawatirkan lambat atau cepat akan menandingi (menyaingi) kekuasaan sentral (keraton). Oleh karena itu daerah kekuasaan yang makin kepinggir harus makin diperlemah, agar jangkauan kontrol kekuasaan dari pusat makin mudah.

Banyak contoh dari sejarah bangsa yang dapat dikemukakan, umpamanya dalam kurun waktu kerajaan Mataram berkuasa, terjadi penghancuran kekuasaan bandar- bandar Utara pulau Jawa. Raja Mataram khawatir, syahbandar-syahbandar penguasa pelabuhan yang kaya karena perdagangan itu, akan membangun sentra baru, dan menyaingi keraton. Sejak penghancuran



bandar-bandar pulau Jawa Utara itu, penduduk Jawa surut ke pertanian dan membelakangi laut (Ong 1987). Berbeda dengan Sukarno yang merasa terobsesi sebagai raja Majapahit, Suharto sering merasa dirinya sebagai reinkarnasi raja Mataram dan melihat Indonesia sebagai kerajaan Mataram. Maka pada waktu pemerintah Orde Baru (1983) menyetujui pembukaan Sabang sebagai pelabuhan bebas (*free port*) dan membangun beberapa industri di Aceh seperti industri gula dan kertas, sebagai “hadiah” dalam rangka penyelesaian pertikaian politik dan kemenangan Golkar dalam pemilu di-daerah itu, namun kenyataannya, semua berakhir dengan kegagalan.

Masalahnya, pemerintah Orde Baru ketika itu tidak sepenuh hati membangun pelabuhan bebas Sabang dan kedua industri itu. Misalnya industri gula, pasokan tebu harus didatangkan dari Jawa Timur, sehingga produk gula industri itu terperangkap dengan biaya sangat tinggi (*high cost product*) dan tidak mungkin bersaing dipasar domestik. Sedangkan pabrik kertas, ternyata lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat. Bahan baku pabrik ini memang berasal dari penebangan hutan Aceh, tetapi penebangan hutan itu dilakukan dalam jumlah yang berlebihan, lebih banyak dijual ke luar negeri dari pada untuk konsumsi bahan baku industri kertas tersebut. Begitu juga nasib pabrik semen dan aspal di Sulawesi Selatan, akhirnya mengalami nasib yang sama. Oleh karena itu, politik ekonomi pemerintah Orde Baru sampai dengan permulaan tahun 1990 ditandai dengan politik ekonomi sentralistis yang represif.

Berbagai dampak sosial dari kebijakan ketat dan sentralisasi ekonomi yang dijalankan selama 25 tahun rezim Suharto (Pembangunan Jangka Menengah I), selain kesenjangan ekonomi juga tampak jelas pada ketimpangan distribusi penduduk yang sangat parah. Hampir dua pertiga penduduk Indonesia ( $\pm 70\%$ ) tinggal di pulau Jawa yang hanya merupakan 7% dari luas daratan Indonesia. Dalam priode PJP I itu, migrasi penduduk luar pulau Jawa ke Jawa lebih besar jumlahnya dari pada usaha transmigrasi penduduk Jawa keluar pulau Jawa, walaupun biaya untuk proyek-proyek transmigrasi ini telah memakan anggaran (budget) nasional setiap tahun  $\pm 2.9\%$  dari ABPN.

Tarikan pulau Jawa sebagai pusat kekuasaan, politik, dan budaya, terutama kota-kota besarnya seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung, telah meningkatkan proses migrasi ke kota (*urban-migration*), kehidupan urbanisasi yang tidak sehat, dan menghasilkan kemiskinan,



meluasnya permukiman kumuh (*slum areas*) serta kesenjangan sosial yang cukup parah dari sebelumnya. Pemerintah akhirnya harus menjawab tantangan di atas, dengan sebuah perubahan kebijakan ekonomi nasional, karena kalau terlambat kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi penduduk (*spatially inequality*) tersebut akan mengganggu kesetabilan nasional dan integrasi bangsa.

### **Perubahan kebijakan Pembangunan Nasional**

Pada tahun 1993 GBHN secara eksplisit menyatakan perlunya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Secara resmi pandangan tersebut termuat dalam GBHN (1993), bahwa pada prinsipnya pembangunan daerah itu :

- merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
- ditujukan untuk pemerataan distribusi pembangunan dan hasil-hasil pembangunan itu sendiri
- merupakan usaha untuk mempertinggi standar kehidupan dan kemakmuran masyarakat

Keputusan ini menyebabkan pemerintah pusat harus menemukan pendekatan baru, dari pendekatan sentralisasi yang berasaskan pandangan dunia "*indic cosmology*" yang telah dijalankan selama 25 tahun, tetapi hanya menghasilkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, kepada pendekatan pembangunan daerah (regional). Bagaimana mengangkat daerah-daerah di pinggiran, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Oleh karena itu, kerjasama ekonomi sub-regional adalah logika yang tepat untuk di kembangkan. Apalagi sebagai negara kepulauan, Indonesia bertetangga dengan berbagai negara yang ekonominya relatif telah lebih maju (Lee 1991).

Fokus kajian dalam makalah ini ditujukan kepada tinjauan apakah pendekatan pembangunan ekonomi regional ini dapat didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, karena dari segi filosofi politik, pembangunan ekonomi regional ini bertentangan dengan kebijakan politik *indic-cosmology* yang sentralistis. Sejauh mana konsep dan program kerjasama pembangunan ekonomi regional dalam perjalanannya tidak berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat.



Sejauh mana pula kekhawatiran pemerintah pusat dapat diredam oleh daerah-daerah yang terlibat dalam pembangunan ekonomi regional ini? Apakah wilayah kerjasama ekonomi (*regional economic cooperation*) negara tetangga yang terlibat dalam kerjasama ekonomi ini, seperti Thailand Selatan dan Malaysia Utara dalam IMTGT, tidak mengalami masalah yang sama dengan Indonesia?

### **Harapan dan kendala dalam IMTGT**

Secara sederhana “Growth Triangle” dapat didefinisikan sebagai “transnational economic zones spread over well-defined, geographically proximate areas covering three or more countries where differences in factors endowment are exploited to promote external trade and investment” (Kakazu 1994). Dalam rangka kebijakan baru pembangunan ekonomi daerah (*regional economic development*) ini, maka keikutsertaan beberapa propinsi Sumatra bahagian Utara, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau (semula tahun 1994 hanya Aceh dan Sumatra Utara) dalam IMTGT merupakan langkah yang dianggap sangat esensial dan menjanjikan.

Pertama, langkah ini merupakan usaha untuk mengembangkan kegiatan bisnis daerah-daerah di propinsi tersebut. Dan kedua, sekali gus diharapkan sebagai langkah kompetitif dalam pasar global Asian dan AFTA. Dengan demikian partisipasi Indonesia dalam IMTGT didasarkan pada harapan bahwa keikutsertaan itu akan memenuhi tujuan nasional seperti telah dituangkan dalam keputusan GBHN (1993), bahwa kerjasama ekonomi regional dalam IMTGT akan memperkuat struktur dan efisiensi pembangunan ekonomi daerah (*regional*), daya kompetisi, kelenturan dalam menyongsong perubahan ekonomi global (Crouch 1984).

Bagi masyarakat Sumatra bahagian Utara (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau) kerjasama dalam IMTGT ini seakan “mengulang sejarah lama” (*going back to history*) ratusan tahun yang silam. Masa-masa kejayaan kesultanan Aceh, Melayu, Riau dan Minangkabau, hubungan dagang dengan Siam (Thailand) Melaka dan Johor (Malaysia) merupakan hubungan dagang antar pulau yang ketika itu sangat ramai. Oleh karena itu bagi masyarakat Sumatra Bahagian Utara, IMTGT seakan mengulang sejarah lama. Bagi Indonesia secara keseluruhan, motif keturutsertaan dalam IMTGT sangat erat kaitannya dengan keputusan MPR dalam GBHN 1993, yaitu untuk membangun ekonomi regional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi pembangunan regional dalam rangka kerjasama



segitiga ini menuntut investasi dalam infrastruktur yang cukup berat, karena itu pemerintah pusat (Jakarta) harus memainkan peranan yang besar, walaupun tidak perlu mengelola dan mendanainya sendiri secara langsung. Mungkinkah itu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk Sumatra Bahagian Utara, demi kesuksesan IMTGT?

## **Sejarah lama dan “the trouble triangles” yang baru ?**

Adalah menarik untuk memetakan ketiga wilayah segitiga kerjasama ekonomi regional agar ada perbandingan masalah yang dihadapi oleh ketiga wilayah itu :

### **(1) Sumatra Bahagian Utara:**

“*Going back to history,*” tidak selalu menemukan jejak (napak tilas) yang menyenangkan, terutama setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dan masyarakat bekas kolonial Belanda itu memulai pengalamannya sebagai satu Negara Bangsa (*nation states*). Dalam perjalanannya kemudian, pemerintahan pusat rezim Sukarno (Orde Lama) mulai memberlakukan kebijakan politik sentralisasi (1957) yang menuai pemberontakan–pemberontakan daerah. Di Sumatra Bahagian Utara, Aceh bergolak dengan DI/TII Daud Berureah (1956), sebagai protes terhadap penggabungan daerah Aceh dengan propinsi Sumatra Utara. Kemudian disusul oleh pemberontakan PRRI yang melibatkan Propinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau (1958). Kedua pemberontakan yang berdarah darah ini, akhirnya disusul pula oleh gerakan separatism GAM sesudah jatuhnya rezim Suharto (1998).

IMTGT untuk wilayah Indonesia, yaitu Sumatra Bahagian Utara, merupakan representasi daerah yang pernah dan terus bergolak menentang pemerintah pusat (seperti GAM yang sampai sekarang belum juga selesai). Walaupun beberapa ahli perdagangan (US-AEP 1999) menyatakan bahwa IMTGT dalam perakteknya seperti: “*to revisit the idea of promoting traditional trade links and are now jointly developing their border areas,*” tetapi masing-masing pusat pemerintahan dari negara kerjasama regional ini (seperti Bangkok, Kuala Lumpur dan Jakarta) memiliki masalah tertentu dengan *economic region* (seperti Thailand Selatan, Malaysia Utara dan Sumatra Bahagian Utara) yang bekerjasama itu. Bagi pemerintah pusat (Jakarta), daerah Sumatra Utara adalah daerah yang memiliki cacat sosial dan kultural (*social and cultural stigma*), karena mereka telah melakukan pemberontakan dan gerakan



separatisme. Bagi pemerintah pusat kejadian ini dianggap merupakan sikap tidak loyal pada pemerintah pusat (Jakarta).

## **(2) Thailand Selatan**

Seperti Sumatra Bahagian Utara, Thailand Selatan yang diikuti sertakan dalam IMTGT terdiri dari propinsi Satun, Narathiwat, Pattani, Yala dan Songkhla. Sebahagian besar dari wilayah ini, sejak sebelum Perang Dunia II, telah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Bangkok. Setelah Perang Duania II selama satu decade (1960-1970) terjadi pemberontakan dan kekacauan yang didalangi oleh gerakan komunis. Akan tetapi pada tahun-tahun terakhir ini (2004-2005), muncul kembali gerakan separatis (Moslem Pattani) yang mengakibatkan jatuhnya korban ratusan orang. Kejadian tragis ini telah menimbulkan suasana yang tidak mnyenangkan dengan tetangga negara mereka (Malaysia). Kecurigaan pihak Thailand bahwa Malaysia bersimpati pada gerakan Melayu Moslem Pattani dapat dimaklumi, seperti kecurigaan Indonesia terhadap Malaysia yang dianggap telah menampung pelarian GAM ke negara itu. Dewasa ini pemerintah Thailand telah menyatakan bahwa propinsi Narathiwat, Pattani dan Yala, yang penduduknya majoritas Islam, sebagai “zona keganasan.” Menteri Pertahanan Thailand Jendral Thammarak Ayutthaya, secara eksplisit menyatakan bahwa “kami akan memerangi mereka di zon keganasan” (Berita Harian, hal.24, Jun. 24, 2005).

## **(3) Malaysia Utara**

Wilayah IMTGT Malaysia Utara yang terdiri dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, mungkin merukan wilayah *regional economic* yang paling sedikit punya masalah dengan pusat kekuasaan pemerintahan (Kuala Lumpur). Walaupun di daerah Utara Malaysia ini pengaruh Partai Islam (PAS) sebagai partai pembangkang masih relatif kuat. Begitu juga dengan Pulau Pinang, dimana dominasi Cina di bidang ekonomi cukup tangguh, ketimbang orang Melayu. Akan tetapi, secara keseluruhan pemerintahan pusat Malaysia tetap merasa dapat mengendalikan kebijakan politik dengan aman.

Kedah yang merupakan negara bahagian yang relative sangat luas, penghasil beras yang utama untuk Malaysia dan letaknya berbatasan dengan propinsi-propinsi yang beragama Islam di Thailand, dikuasai oleh Partai Islam PAS. Baru pada pemilihan



raya 2004, partai Islam PAS dapat dikalahkan oleh UMNO. Dewasa ini, pemerintahan di propinsi itu sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat Malaysia. Dapat dimaklumi apabila pemerintahan Malaysia (Kuala Lumpur), harus berhati hati untuk melepas kawasan Utara Malaysia dalam membuat keputusan atau komitmen bisnis dengan Thailand dan Indonesia. Perdana Menteri Malaysia menempatkan seorang Menteri Senior pada kantor Perdana Menteri (semacam Menteri Negara/Non-portfolio) khusus untuk urusan IMTGT (Datuk Daim Zainuddin yang kemudian menjadi Menteri Keuangan menggantikan Anwar Ibrahim pada zaman Mahatir Mohammad).

Dari uraian diatas jelas bahwa ketiga wilayah IMTGT memiliki masalah budaya dan politik dengan pusat pemerintahan masing-masing mereka, dan antar negara yang terlibat dalam kerjasama ekonomi tersebut. Jadi tidaklah secerah seperti yang di gambarkan oleh US-Asia Environment Partnership (1999:2) :

*“Imagine, a project to construct a road between Malaysia and Thailand for which funding comes from Malaysia, technology from Thailand, and human resources from Indonesia and which results in high-quality product, better trained work forces, and high investment yield.”*

Memang bagi Malaysia ekonomi itu adalah politik dan dunia perdagangan ini adalah dunia security (keamanan). Tanpa “political security” kersama regional tidak akan pernah ada (Acharya 1994)

Dari gambaran situasi sosio-politis ketiga wilayah IMTGT diatas dapat di simpulkan bahwa ketiga daerah itu merupakan daerah yang masing-masing memiliki masalah (*trouble*) dengan pusat pemerintahannya.

Bagi Sumatra bahagian Utara sebagai daerah yang terlibat dalam berbagai bentrokan politik dengan pusat kekuasaan (Jakarta) telah meninggalkan “stigma social” sendiri, dan arena itu tidak mudah mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam kerjasama ekonomi regional IMTGT. Tidak saja dalam melaksanakan tetapi juga dalam perencanaan, dukungan fasilitas dan jaminan (*moral-political protection*) dihadapan patner asing mereka. Memang seyogianya pemerintah pusat, terutama pada tahap-tahap pertama harus memainkan peranan sebagai “a





*leading role to provide a conducive climate for the private sector to avail the opportunities for development of the growth Triangle” (ISIS-ADB 1994:147)*

Sesuatu yang menarik dipertanyakan dalam kaitan diatas ialah bagaimana mereka mengambil keputusan bersama dalam meng-implimentasikan IMTGT? Sejauh mana pemerintan pusat masing masing Negara dilibatkan?

### **Mekanisme pengambilan keputusan \*\*)**

Dalam mekanisme pengambilan keputusan, terdapat tiga tingkat institusi yang terpisah : (1) Rapat Kerja Pembisnis (*Business Working Group Meeting*), (2) Pertemuan Pejabat Senior Pemerintahan (*Senior Government Official Meeting*) dan (3) Pertemuan para Menteri Pemerintahan (*Government Ministers Meeting*). Rapat kerja pada tingkat pertama merupakan pertemuan pada pelaku bisnis, termasuk industri dan Jasa. Dalam rapat ini dibahas proyek antar negara yang dapat dilakukan bersama dalam berbagai bidang (industri, keuangan, pertanian, jasa (turisme, pendidikan, atau perhotelan), tenaga kerja, pertambangan, dan penangkapan ikan (maritim).

Persetujuan antar pelaku bisnis dibuat dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding). MoU ini kemudian dibawa kedalam rapat kerja tingkat senior government official. Pemahasan pada tingkat ini, ditujukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah masing-masing negara dapat memberikan dukungan fasilitas dan kemudahan, apabila perjanjian bisnis dalam MoU tersebut dilaksanakan. Apabila tidak mungkin, maka MoU itu dibatalkan atau harus dikembalikan untuk direvisi atau diperbaiki. MoU yang telah disetujui dalam rapat Senior Government Official ini, kemudian di bawa kedalam rapat para menteri yang terkait untuk disyahkan.

Dalam pertemuan puncak ini, biasanya para pembisnis telah diundang untuk hadir. Para pembisnis, masing-masing dengan patnernya, menanda tangani MoU tersebut dengan disaksikan oleh menteri dari masing-masing negara, sesuai dengan bidang atau sector

---

\* data ini berasal dari catatan penulis sebagai tenaga ahli Gubernur Sumatra Utara



kerjasama yang terkait dalam MoU tersebut. Kalau perjanjian itu mengenai industri, maka disamping pembisnis yang terkait dalam MoU tersebut harus disaksikan oleh Menteri Perindustrian masing negara yang bersangkutan, sehingga MoU tersebut merupakan dokumen resmi dua atau tiga negara yang terlibat dalam kerja sama regional tersebut.

Apa yang terjadi dalam rapat-rapat kerja di tiga tingkatan tersebut? Para pembisnis dari Indonesia, pertama karena banyak yang tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik, maka pertemuan resmi antar pembisnis dari ketiga negara menjadi sama sekali tidak efisien. Banyak pembisnis dari Indonesia yang meninggalkan rapat dan pergi “shopping” atau ngeluyur, apalagi kalau pertemuan itu di daerah turis, seperti di Phuket (Thailand) Langkawi, atau di Pulau Pinang. Kedua, mereka cenderung mencari partner bisnis baru ketika rapat telah sedang berlangsung. Sedang dalam rapat-rapat senior government official, para gubernur mengirimkan Kepala-Kepala Dinas, yang berfikir sangat birokratis dan kaku, sehingga draft MoU yang harus dibahas dengan partner mereka dari negara lain, sering mengalami kelambanan dan tanpa perbaikan yang berarti.

Kemudian pada waktu diajukan ke dalam pertemuan para menteri draft MoU tersebut tidak diteliti lagi oleh para staf menteri yang hadir. Apalagi dari pihak Indonesia yang hadir dalam pertemuan para menteri itu sering hanya dihadiri oleh seorang Menko. Kalau ada menteri yang hadir, karena Menko berhalangan, maka menteri itu juga kemudian mewakili menteri-menteri di bidang yang lain dalam penanda-tanganan MoU walaupun bukan bidangnya.

Kenyataan di atas ditanggapi oleh Thailand dan Malaysia sebagai ketidak seriusan Indonesia dalam berpartner. Banyak keluhan mereka terhadap sikap para menteri atau utusan pemerintah pusat yang sering berganti. Karena itu dalam pertemuan atau diskusi rapat kerja menteri atau Menko dari Indonesia, selalu terkesan bahwa menteri yang kebetulan hadir itu tidak menguasai masalah. Hal ini berakibat buruk pada waktu meng-implimentasikan MoU tersebut dilapangan. Pada tahun 1996 umpamanya, jumlah MoU yang ditandatangani dalam rapat para menteri untuk Indonesia ada 15 buah, ternyata setelah satu tahun kemudian dari 15 MoU tersebut hanya 3 yang dapat direalisasikan.

Sebahagian besar kemacetan, mengapa tidak dapat direalisasikan ialah menyangkut masalah izin dari pemerintah pusat (Jakarta), walaupun MoU tersebut telah turut ditandatangani oleh



menteri departemen yang bersangkutan. Karena itu, dalam rapat tahunan selanjutnya, patner pebisnis Indonesia (apakah dari Thailand atau Malaysia) mempertanyakan arti persetujuan menteri yang bersangkutan dalam MoU yang dengan susah payah telah dipersiapkan. Pembicaraan mengenai izin dari pusat (Jakarta) merupakan topik yang tidak putus-putusnya diulang oleh patner-patner pebisnis Indonesia, walaupun para gubernur juga telah berusaha mendekati pemerintah pusat agar izin pemerintah pusat dapat dikeluarkan secepatnya. Begitu juga masalah tanah untuk lokasi industri, membuat masalah perizinan kian ruwet dan ber-tele-tele. Renacanya para gubernur ingin mempersiapkan “one stop services,” cukup diurus di kantor IMTGT di ibu-kota propinsi saja, ternyata harus diurus sampai ke Jakarta, dan sampai di sana menjadi bertambah ruwet.

Masalah kedua yang turut menggagalkan proyek kerjasama ini adalah masalah perbankan. Modal pebisnis dari pihak Indonesia, sering macet di Bank, bahkan ada yang tidak keluar sama sekali. Beberapa alasan yang mengemuka, karena Bank terkait harus kembali mempelajari MoU, karena telah ditandatangani oleh Menteri tertentu yang bukan bidangnya. Dalam beberapa kasus, proyek itu harus ditalangi lebih dahulu oleh patner mereka agar dapat dilaksanakan. Bahkan mereka sering mendapat hambatan di pelabuhan dalam usaha memasukkan peralatan atau bahan baku yang dibutuhkan untuk industri tertentu. Proyek-proyek IMTGT yang terbengkalai atau macet ditengah jalan merupakan advertensi yang buruk dalam kelanjutan IMTGT di Sumatra Bahagian Utara.

Perusahaan penerbangan “Pelangi” yang disponsori oleh Malaysia, telah menjelajahi rute: Langkawi, Banda Aceh, Medan dan Penang. untuk mendorong pariwisata terpaksa tutup setelah beroperasi dua tahun, dengan alasan yang tidak jelas. Setelah krisis moneter dan pergantian pimpinan puncak pemerintahan Indonesia, di Sumatra Bahagian Utara orang dan pengusaha telah jarang yang membicarakan IMTGT. Kalaupun ada beberapa perusahaan dan industri yang terkait dengan IMTGT, maka perusahaan dan insdustri itu lebih banyak melanjutkan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Selebihnya para pebisnis danb industri (yang baru berdiri) lebih senang untuk tidak mengaitkan hubungan dagang dan industri mereka dengan IMTGT. Apalagi setelah peristiwa GAM, di Aceh IMTGT seakan telah tutup buku.



## **Kesimpulan dan diskusi :**

Ada tujuh faktor penting untuk kesuksesan kerjasama ekonomi regional segitiga (growth triangles), yang diusung oleh Hroshi Kakazu dari Universitas Nagoya, dari hasil penelitiannya pada berbagai “Growth Triangle” di Asia, dalam seminar BIMP-EAGA di Kinabalu bulan Januari 1997 yang lalu. Tiga dari tujuh factor tersebut yang relevan dengan sukses atau tidaknya IMTG dalam kaitan Sumatra Bahagian Utara, ialah :

- (1) *Successful growth triangle requires reasonably well developed infra structure, particularly transportation system.*
- (2) *Along with geographically proximity and complimentaries among GT Participants, strong cultural and social ties are the primary factors for establishing a successful GT*
- (3) *One of the greatest challenges facing the successful development to the GT concept by participating region and and countries. Strong political commitment is also absolutely necessary in order to ensure a functional institution framework for cooperation among the central and local governments, the private sector, and the residents GT*

Walaupun ketiga factor diatas saling terkait, tetapi factor utama, “... *strong political commitment ... among the central and local government ...*” dalam kasus IMTGT menjadi factor yang menjadi fokus permasalahan dalam makalah ini. Karena hanya dengan dukungan penuh pemerintah pusat yang memungkinkan factor pertama (infra struktur, seperti komunikasi, jalan, pelabuhan, transport laut dan udara), dapat dipenuhi. Ternyata dari hasil uraian diatas factor dukungan pemerintah pusat ini sangat minim bahkan mungkin dapat dikatakan telah dilakukan dengan setengah hati, sekedar untuk memenuhi basa basi (*political fatsum*) hubungan bilateral yang baik dengan pemerintah Malaysia dan Thailand.

Memang faktor kedua, “... *geographically proximity ... strong cultural and social ties ...*” bagi Sumatra Utara telah merupakan “*given*” dengan atau tanpa IMTGT kegiatan bisnis itu seakan “mengulang sejarah lama” (*going back to history*), atau seperti “*to revisit the idea promoting traditional trade links ...*” Namun, IMTGT ini hanya akan berarti apabila ada dukungan penuh pemerintah pusat. Dan dukungan inilah yang tidak kelihatan, karena itu



dalam pertemuan para pebisnis, pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh para pembisnis Thailand dan Malaysia, “... are your government still serious ... ?

Dari uraian dan analisa diatas adalah relevan untuk mengkaji kembali pandangan “*indic cosmology*” yang dianut oleh kerajaan Majapahit atau Mataram, bahwa centra kekuasaan itu tidak boleh ditandingi oleh sentra-sentra lain, apalagi di pinggiran kerajaan, Dalam berbagai tingkah laku politik seperti digambarkan oleh para pakar ilmu sosial-politik, bahwa Presiden Sukarno dalam tindak-tanduk politiknya seakan terobsesi bahwa dia adalah reinkarnasi raja Majapahit, sedangkan Pak Harto sebagai Raja Mataram. Apakah dengan demikian, kita dapat berkesimpulan bahwa kegagalan IMTGT sangat erat kaitannya dengan dengan pandangan “*indic cosmology*” yang masih berakar dalam tingkah laku politik pemerintah pusat?

